BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Bupati Muna Nomor 291 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna menenjadi dasar hukum pemekaran Kabupaten Muna menjadi Kabupaten Muna (Kecamatan Pasir Putih, Maligano, Wakorumba Selatan, Kabangka, Bone, Parigi, Kabawo dan Tongkuno) dengan nama Kabupaten Wuna, Kabupaten Muna Barat (Kecamatan Lawa, Sawergadi, Kusambi, Barangka, Tikep, Tiworo Tengah dan Maginti) dengan nama Kabupaten Lawero dengan lokasi ibukota Kabupaten di Sawergadi dan Kota Raha (Kecamatan Napabalano, Lasalepa, Batalaiworu, Katobu, Duruka, Lohia, Kontunaga, dan Watuputih). Untuk pembentukan Kota Raha dibentuk Panitia Percepatan Peningkatan Status Ibu Kota Kabupaten Muna Menjadi Daerah Otonom Kota Raha yang bertugas memperjuangkan upaya usulan pemekaran sampai ketingkat pusat.

Sampai dengan tahun 2009, rencana pemekaran tersebut tetap dilaksanakan khususnya Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha yang rencananya sebelum bulan Oktober 2009 akan dimekarkan. Hal ini diperkuat dengan telah adanya Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kota Raha dan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Akan tetapi rencana pemekaran tersebut ditunda sampai dengan selesainya pemilu 2009.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengungkapkan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan melalui kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi dalam pemerintahan dan keuangan

patut dilihat sebagai bagian dari reaksi yang diberikan terhadap tuntutan pembaharuan yang makin luas dari masyarakat dan keinginan agar jalannya pemerintahan daerah benar-benar diselenggarakan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan daerah, termasuk mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki. Otonomi dengan demikian adalah kebutuhan dibukanya kesempatan pada daerah untuk menata diri sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya agar daerah dapat berkembang. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah, pemerintahan daerah sesuai fungsinya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diberi amanat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya daya saing daerah, di antaranya adalah kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Identifikasi, perumusan, dan pengembangan kompetensi inti masing-masing daerah diperlukan, agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti.

Daya saing adalah kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Sedangkan indikator penentu daya saing adalah perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, *governance* dan kebijakan pemerintah, dan manajemen dan ekonomi makro (*Pitter Abdullah, 2002:15*).

Melihat kondisi Kabupaten Muna saat ini yang akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) bagian, tentunya masing-masing calon kabupaten/kota menginginkan agar

daerahnya meningkat serta memiliki masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah diberi amanat dalam menyelanggarakan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya daya saing. Diantara komponen daya saing daerah yang digunakan dalam penelitian adalah aspek infrastruktur dan sumber daya alam serta sumber daya manusia.

Daya saing infrsatruktur dan sumber daya alam terdiri dari modal fisik yaitu infrastruktur kota dan wilayah (jalan dan pelabuhan) yang membuka akses dari daerah satu ke daerah lain, georafis dan kekayaan alam yang dapat mendukung dan mendorong aktivitas perekonomian daerah dan kemasyarakatan. Apabila infrastruktur buruk maka daya saing daerah akan buruk, karena sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal *(Tumar Sumihardjo, 2008).*

Selain infrastruktur dan sumber daya alam, daya saing yang dibutuhkan yaitu aspek Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jumlah dan kualitas penduduk serta kemajuan IPTEK, dimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sumber daya manusia dapat dikomposisikan ke dalam beberapa indikator yaitu karakteristik penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kualitas hidup, perilaku dan nilai sosial. Sub-indikator karakteristik penduduk dan ketenagakerjaan mencerminkan aspek kuantitas dari sumber daya manusia, sedangkan sub-indikator pendidikan, kualitas hidup, perilaku dan nilai sosial merupakan sisi kualitas dari sumber daya manusia.

Dalam rencana pemekaran Kabupaten Muna, maka perlu dilakukan kajian awal agar daya saing Kabupaten Muna dapat meningkat atau minimal tetap. Dalam hal ini daya saing untuk aspek infrastruktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana daya saing Kabupaten Muna saat ini terhadap kabupaten/kota lain dilihat dari aspek infrastruktur dan sumber daya alam serta sumber daya manusia?
- Apakah daya saing Kabupaten Muna berubah jika dimekarkan menjadi Kabupaten Muna, Kota Raha dan Kabupaten Muna Barat?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi perubahan daya saing Kabupaten Muna jika Kota Raha dan Kabupaten Muna Barat menjadi daerah otonom.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan studi yang diharapkan, adalah:

1. Mengidentifikasi daya saing Kabupaten Muna saat ini terhadap kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari aspek infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;
2. Mengidentifikasi daya saing Kabupaten Muna jika dimekarkan menjadi Kabupaten Muna, Kota Raha dan Kabupaten Muna Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis studi ini diharapkan dapat menambah wacana pada pengembangan perencanaan Wilayah dan Kota mengenai Kabupaten Muna. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pemerintah Kabupaten Muna sebagai bahan evaluasi bagi Kabupaten Muna dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Muna.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian mengenai "Identifikasi Perubahan Daya Saing Daerah Dari Aspek Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia Akibat Pemekaran Daerah", meliputi ruang lingkup wilayah studi dan lingkup materi.

1.5.1 Lingkup Wilayah Studi

Adapun wilayah studi dalam penelitian ini terdiri dari 23 Kecamatan di Kabupaten Muna saat ini . Sedangkan untuk Kabupaten Muna jika dimekarkan terdiri dari 8 kecamatan, Calon Kota Raha yang akan dimekarkan terdiri dari 8 kecamatan , untuk Calon Kabupaten Muna Barat terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 9 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1.

Tabel I.1
Wilayah Studi Dalam Penelitian

No	Kecamatan di Kabupaten Muna saat ini	Kecamatan di Kabupaten Muna jika mekar	Kecamatan di Calon Kota Raha	Kecamatan di Calon Muna Barat	Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara
1	Barangka	Bone	Napabalano	Lawa	Kendari
2	Batalaiworu	Tongkuno	Lasalepa	Kusambi	Bau-Bau
3	Bone	Parigi	Batalaiworu	Sawergadi	Buton
4	Duruka	Kabawo	Katobu	Barangka	Konawe
5	Kabangka	Kabangka	Duruka	Tikep	Kolaka
6	Kabawo	Wakorumba Selatan	Lohia	Tiworo Tengah	Konawe Selatan
7	Katobu	Pasir Putih	Kontunaga	Maginti	Wakatobi
8	Kontunaga	Maligano	Watopute		Bombana
9	Kusambi				Kolaka Utara
10	Lasalepa				
11	Lawa				
12	Lohia				
13	Maginti				

No	Kecamatan di Kabupaten Muna saat ini	Kecamatan di Kabupaten Muna jika mekar	Kecamatan di Calon Kota Raha	Kecamatan di Calon Muna Barat	Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara
14	Maligano				
15	Napabalano				
16	Parigi				
17	Pasir Putih				
18	Sawerigadi				
19	Tikep				
20	Tiworo Tengah				
21	Tongkuno				
22	Wakorumba Selatan				
23	Watopute				

Gambar 1.1 Peta Orientasi
Kabupaten Muna
Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 1.2
Peta Rencana Pemekaran Kabupaten Muna

1.5.2 Lingkup Materi

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta atau perusahaan".
- Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Daya saing daerah adalah "Kemampuan perkonomian daerah adalah mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional" (*Piter Abdullah, 2002*).

Indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan *Governance* dan Kebijakan Pemerintah, dan Manajemen dan Ekonomi Makro.

Dari sembilan indikator penentu daya saing daerah, indikator infrastruktur dan sumber daya alam di gabung dalam satu indikator, akan tetapi dalam penelitian ini infrastruktur dan sumber daya alam dipisahkan menjadi dua indikator, sehingga dalam penelitian ini hanya mengambil tiga indikator penentu daya saing. Pemilihan tiga indikator ini didasarkan pada kemudahan dalam menganalisis karena data dari ketiga indikator tersebut lebih terukur dan lebih mudah dibandingkan datanya. Adapun ketiga indikator tersebut terdiri dari:

1. Infrastruktur

   Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.

2. Sumber Daya Alam

   Indikator sumber daya alam mendukung daya saing daerah melalui modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.

3. Sumber Daya Manusia

   Indikator sumber daya manusia mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahap untuk membantu dalam proses penyusunan penelitian, dimana dalam metodologi penelitian dilakukan melalui pendekatan survey di lapangan. Dalam melakukan penelitian dilakukan beberapa cara untuk menyusun laporan dengan judul ” Identifikasi Perubahan Daya Saing Daerah Dari Aspek Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Akibat Pemekaran Daerah” meliputi:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau survey dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan kajian. Dalam pengumpulan data terbagi atas dua cara yaitu secara primer dan sekunder. Karena data yang diperlukan hanya berupa data statistik maka jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu berupa data statitik Kabupaten Muna Dalam Angka dan Sulawesi Tenggara dalam Angka Tahun 2008.

1.6.2 Metode Analisis

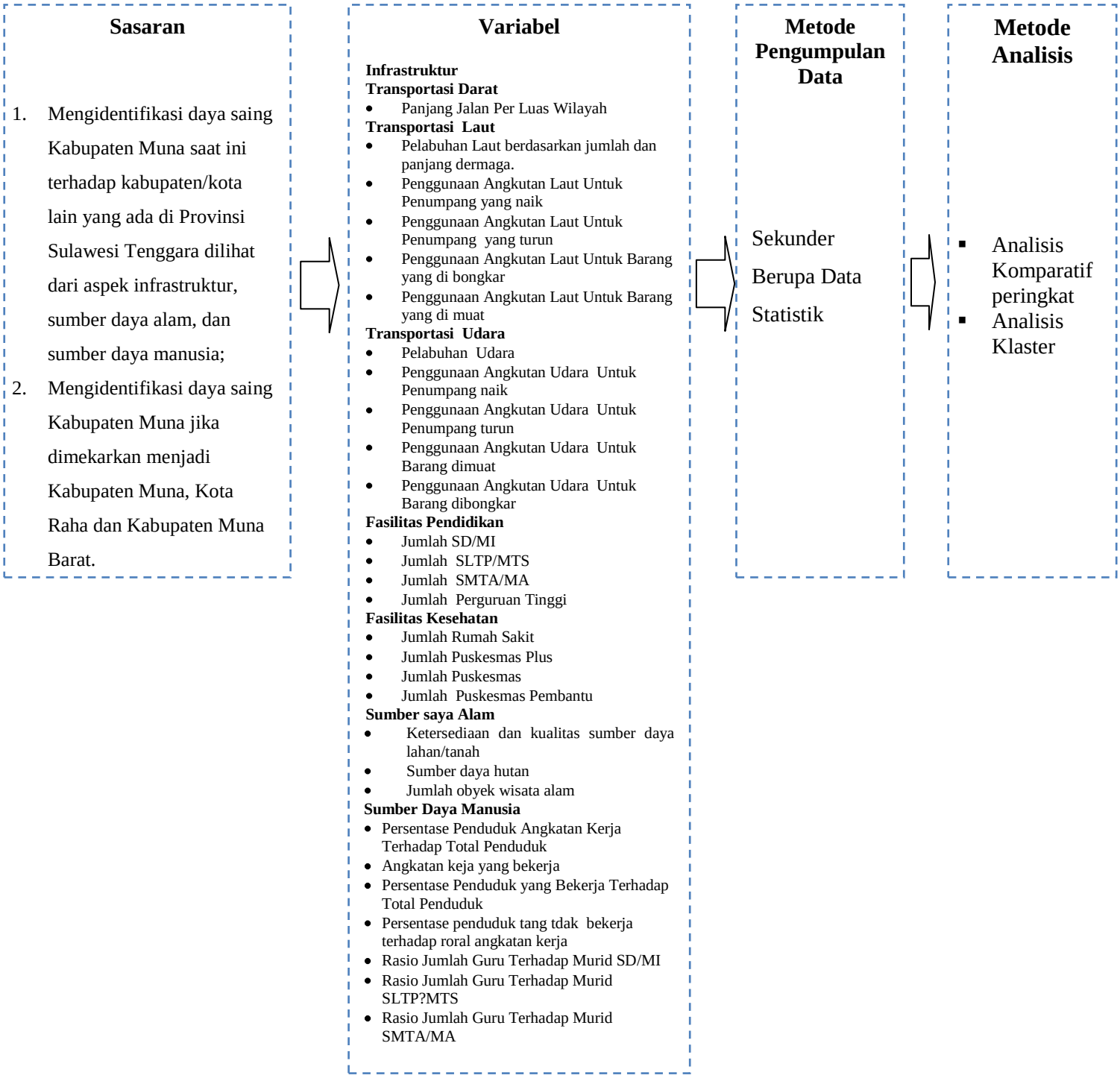
Setelah kegiatan pengumpulan data sekunder, selanjunya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis komparatif peringkat dan analisis klaster.

1.6.2.1 Analisis Komparatif Peringkat

Metode analisis ini digunakan untuk membandingkan variabel-variabel pada aspek infrastruktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia antara Kabupaten Muna dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara melakukan pemeringkatan yang dinilai dari angka paling besar dari masing-masing variabel terkecuali variabel pada rasio, dimana dilihat angka yang memiliki nilai rasio paling kecil .

1.6.2.2 Analisis Klaster

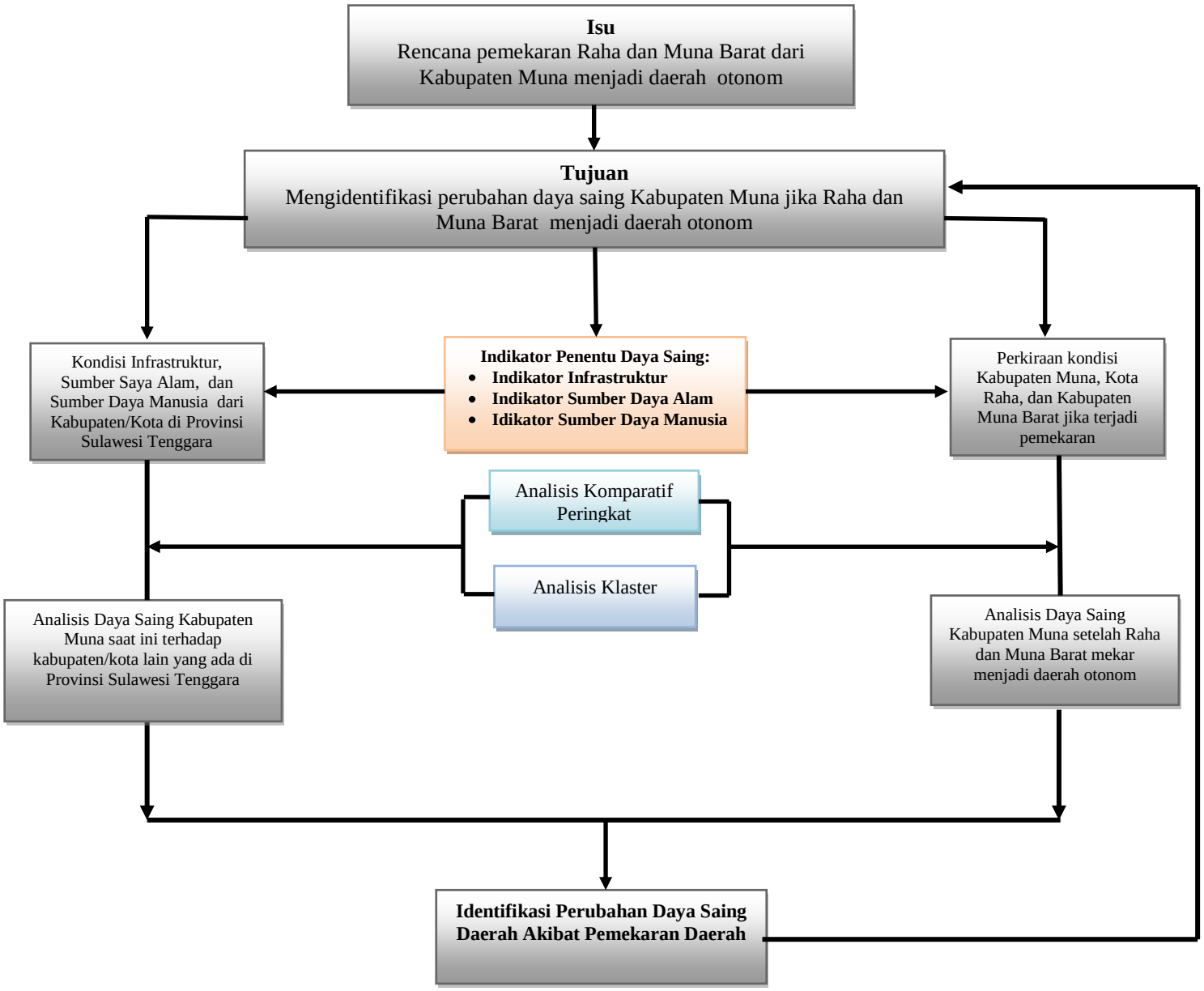
Pada analisis ini digunakan untuk membandingkan data pada setiap aspek yang kemudian diklasifikasikan kedalam tiga dan lima klaster dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengklasifikasian tersebut dilihat dari masing-masing klaster yang memiliki nilai variabel tertinggi paling banyak sehingga terbentuk menjadi beberapa kelompok. Maka dengan demikian dapat dilihat perubahan daya saing yang terjadi pada Kabupaten Muna saat ini dan jika Kota Raha dan Kabupaten Muna Barat mekar menjadi daerah otonom.



Gambar 1.3
Skema Metodologi Penelitian

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di bawah ini merupakan cara berpikir peneliti yang dilakukan sebelum melakukan penelitian di lapangan.



Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran